

PENULISAN SKRIPSI

PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS

ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PROVINSI PAPUA



Diajukan oleh:

FEBBY BETAIDA SIRAIT

NPM : 190513550

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI
PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PROVINSI PAPUA



Diajukan oleh:

FEBBY BETAIDA SIRAIT

NPM : 190513550

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK (*E-Procurement*) DI PROVINSI PAPUA**



Diajukan oleh:

FEBBY BETAIDA SIRAIT

NPM : 190513550

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal :

31/8/2023

Dr.W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK (*E-Procurement*) DI PROVINSI PAPUA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **16 Juni 2023**
Tempat : **Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **B. Hengky Widhi. A., S.H., M.H.**
Anggota : **Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kebesaran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat karunia serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum/skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-procurement*) di Provinsi Papua”**. Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum/skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat doa, bantuan, dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melanjutkan penulisan hukum/skripsi sampai akhir.
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu memberi saran serta motivasi selama proses penyusunan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Bapak Dr. Widiantoro, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membantu memberi pelayanan bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Sukis Wong, S.Ak., CA., M.M., Selaku anggota auditor bagian Pengadaan barang/jasa Pemerintah di kantor BPKP Provinsi Papua yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian serta membantu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Bapak Bernard Sitorus selaku Inspektur pembantu wilayah di Inspektorat Provinsi Papua yang juga telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian serta membantu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Kedua Orang Tua tersayang Bapa Beresman Sirait dan Mama Marisi Siagian serta kakak tersayang Vionny Sirait yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kekasih Rajo Samuel yang telah memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis selama proses penulisan hukum/skripsi ini.
9. Teman dekat penulis Kellyana Margaretan, Avian Kurnia Larasati, Nadya Katharina dan Vinny Dewi yang telah setia menemani selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis berharap hendaknya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun serta penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 April 2023

Penulis,

Febby Betaida Sirait



ABSTRACT

Good procurement of goods and services applies the principles and ethics of procurement in its implementation to produce proper goods/services. In particular, the transparency principle can assist the public in monitoring the ongoing procurement process. In reality, there are still various problems related to the procurement of goods and services that are not by the expected objectives; this is because there is still a process or implementation of the procurement of goods and services that is not by the various principles of procurement of goods and services, especially in the procurement of goods and services electronically (electronic procurement). The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) can assist the government in overseeing ongoing processes (e-procurement), especially in applying the principle of transparency to the activity process (e-procurement). This study aims to see the role of the Government's Internal Supervisory Apparatus (APIP) in this case, namely the Financial Supervisory Agency (BPKP) and the Papua Province Inspectorate, in implementing the principle of transparency in e-procurement in Papua Province. This study uses normative legal analysis, primary legal materials derived from regulations and secondary legal materials, and data collection methods using interviews. Based on the results of the research shows that in carrying out e-procurement supervision in Papua Province, the BPKP and the Papua Province Inspectorate have carried out the role of assurance (guarantee activities) and consulting (consulting activities); This activity is designed to provide added value and improve organizational operations carried out by APIP. The role of APIP can help review how the e-procurement process in Papua Province applies the principle of transparency.

Keywords : *The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). Transparency, E-procurement*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah	24
B. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (<i>E-procurement</i>)	31

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Transparansi.....	39
D. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis Elektronik (<i>E-procurement</i>) di Provinsi Papua	40
E. Peran pengawasan APIP (BPKP dan Inspektorat) terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik (<i>e-procurement</i>) di Provinsi Papua	44
F. Kendala yang dihadapi oleh APIP dalam pengawasan terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (<i>e-procurement</i>) di Provinsi Papua	61
G. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala peran pengawasan APIP terhadap penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis elektronik (<i>e-procurement</i>) di Provinsi Papua	63
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2023

Penulis,



Febby Betaida Sirait